

## PERAN PEMERINTAH DAN MODAL SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA

Putu Ayu Sita Laksmi<sup>1</sup> and I Gde Wedana Arjawa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa Denpasar

Email: ayusitatirtana@gmail.com

**Abstrak:** Kesejahteraan individu merupakan kesejahteraan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai individu sedangkan kesejahteraan masyarakat merupakan kesejahteraan yang dirasakan oleh semua orang dalam suatu kesatuan. Kesejahteraan pelaku usaha adalah merupakan kesejahteraan individu yang bergerak dalam kegiatan usaha. Ada beberapa faktor yang menjadi penentu kesejahteraan pelaku usaha diantaranya yaitu peran pemerintah dan modal sosial. Pemerintah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan pelaku usaha di Indonesia mengingat pelaku usaha dengan karakteristik UMKM memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan ekonomi negara. Keberadaan modal sosial merupakan salah satu aset yang sangat penting dan menjadi alat perekat didalam pelaksanaan kegiatan usaha. Wujud nyata dari modal sosial dalam dunia usaha diwujudkan dalam bentuk kepercayaan, jaringan sosial, tanggung jawab dan kerjasama antar pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dalam pemberdayaan pelaku usaha, peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dan mengkaji peran modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dan modal sosial dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.

### PENDAHULUAN

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber daya alamnya, sumberdaya manusia, modal usaha, teknologi dan lainnya. Di samping faktor ekonomi tersebut, pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terlaksana tanpa ditunjang oleh lembaga-lembaga sosial, sikap masyarakat, kelembagaan politik, dan lainnya, yang kesemuanya merupakan faktor non ekonomi (Adisasmita, 2013).

Pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh dinamika perekonomian daerah, sedangkan perekonomian daerah pada umumnya ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala mikro, kecil dan menengah. Unit usaha yang masuk dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional (Hamid, 2010).

Peran UMKM dalam perekonomian dapat dilihat dari (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor; (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar; (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi; dan (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor (Putra, 2016).

Dari sisi liberalisasi perdagangan, produk Indonesia praktis tidak terlalu menghadapi masalah sebab hampir 80 persen perdagangan Indonesia sudah bebas hambatan. Bahkan ekonomi yang berbasis kerakyatan (UMKM) berpeluang menembus pasar negara ASEAN. Pemerintah telah melakukan upaya percepatan pemerataan pembangunan sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan dengan mengarahkan investasi ke wilayah-wilayah di luar pulau Jawa. Dengan demikian, pusat pertumbuhan ekonomi di masa depan bukan hanya terpusat di Jawa saja tetapi juga di luar Jawa

khususnya di Indonesia timur termasuk di Provinsi Bali (Wangke, 2014). UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan (Bahri, 2019).

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat termasuk kesejahteraan pelaku usaha di dalamnya, *United Nations Development Programme (UNDP)* telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu indikator yang dipergunakan untuk menentukan IPM adalah Pendapatan Nasional Bruto (PNB) yang menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah (BPS Pusat, 2020). Ini mengandung makna bahwa apabila pendapatan masyarakat meningkat maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan juga peningkatan nilai IPM pada suatu wilayah. IPM ini dibentuk oleh 3 dimensi yaitu (1) umur panjang dan hidup sehat; (2) pengetahuan dan (3) standar hidup layak (BPS Provinsi Bali, 2022).- Berdasarkan 3 dimensi tersebut dipergunakan 4 komponen sebagai indikator yaitu (1) Angka Harapan Hidup (AHH), (2) Harapan Lama Sekolah (HLS), (3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan (4) Pengeluaran per kapita disesuaikan (BPS Provinsi Bali, 2022).

Pada periode tahun 2015-2019, capaian IPM Provinsi Bali selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu 72,48 poin pada tahun 2015 menjadi 74,77 poin pada tahun 2019. Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa kesejahteraan masyarakat yang berada di kabupaten/kota Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan yang sering disebut wilayah “Sarbagita” memiliki IPM yang berada di atas rata-rata di Provinsi Bali, sementara lima kabupaten lainnya berada di bawah rata-rata Provinsi Bali.

Pemerintah memainkan peran strategis dalam memperkuat dan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Upaya pengembangan UMKM perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat UMKM memiliki peran yang strategis dalam proses pertumbuhan ekonomi negara. Oleh sebab itu peran pemerintah menjadi penting bagi peningkatan kinerja UMKM untuk dapat bersaing di pasar global. Hasil penelitian Munizu (2010) dan Lee & Tsang (2011) menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki pengaruh signifikan pada kinerja usaha.

Dalam teori pembangunan ekonomi, unsur sosial dan kebudayaan merupakan faktor yang menentukan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam budaya Indonesia, gotong royong dan semangat kebersamaan merupakan sebuah warisan leluhur yang sangat berharga. Semangat kebersamaan untuk menuju sebuah kemajuan itulah yang disebut Modal Sosial. Dengan adanya Modal Sosial yang sesuai dengan kultur budaya masyarakat Indonesia, maka jalan menuju pembangunan ekonomi nasional akan semakin kuat dan Modal Sosial ini juga merupakan faktor penentu kemajuan kinerja UMKM (Arjawa, 2016).

Keberadaan Modal Sosial memang berbeda dengan modal-modal lainnya, seperti modal finansial atau modal manusia. Modal Sosial bersifat kumulatif dan bertambah dengan sendirinya (Putnam, 1993). Indikator Modal Sosial sangat luas cakupannya. Masing-masing peneliti memberikan definisi berdasarkan keperluan riset yang dilakukan. Merujuk pada Ridell (1997), ada tiga parameter Modal Sosial antara lain kepercayaan (*trust*), jaringan (*network*) dan norma (*norm*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengkaji peran pemerintah dalam pemberdayaan pelaku usaha; (2) mengkaji peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha; dan (3) mengkaji modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kesejahteraan Pelaku Usaha

Kesejahteraan diartikan sebagai kesamaan dan keselamatan, kesenangan hidup, kemakmuran, dan sebagainya. Dipoyudo (1995) menyatakan bahwa kesejahteraan yang diartikan kemakmuran (*prosperity*), adalah suatu keadaan dimana kebutuhan manusia dipenuhi dengan wajar, secara mantap/terus-menerus, secara kongkrit itu berarti tersedianya barang dan jasa kebutuhan hidup tidak hanya untuk memungkinkan hidup tetapi juga untuk mempermudah sehingga orang-orang dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan diri dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Menurut Friedlander (1980) bahwa kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi yang dilakukan melalui pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial dengan tujuan untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan serta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan untuk mengembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Ismail, dkk. (2015) mengatakan bahwa kesejahteraan merupakan konsep yang abstrak karena keberadaannya terkait langsung dengan nilai-nilai hidup dan ideology yang dianut oleh seseorang. Kesejahteraan tidak hanya diartikan sebagai ukuran ketersediaan material, tetapi perlu dikaitkan dengan pandangan hidup bangsa yang dianut. Kesejahteraan bukan hanya menjadi cita-cita individu secara perorangan, namun juga menjadi tujuan sekumpulan individu yang terhimpun dalam suatu negara sehingga muncul dua macam kesejahteraan yaitu kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan individu merupakan kesejahteraan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai individu, sedangkan kesejahteraan masyarakat merupakan kesejahteraan yang dirasakan oleh semua orang dalam suatu kesatuan.

Seseorang dikatakan memiliki kesejahteraan subjektif yang tinggi jika orang tersebut merasa puas dengan kondisi hidupnya, sering merasakan emosi positif dan jarang merasakan emosi negatif. Ketika seseorang mencirikan suatu kehidupan baik ia akan banyak membicarakan tentang kebahagiaan, kesehatan, dan umur yang panjang (Diener & Chan, 2011). Kesejahteraan subjektif sendiri ditentukan oleh bagaimana cara individu mengevaluasi informasi atau kejadian yang dialami dengan melibatkan proses kognitif yang aktif karena menentukan bagaimana informasi akan diinterpretasikan. Sementara reaksi afektif dalam kesejahteraan subjektif adalah reaksi individu terhadap peristiwa-peristiwa yang meliputi emosi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam hidupnya. Seseorang dikatakan memiliki kesejahteraan subjektif yang tinggi jika orang tersebut jarang sekali mengalami emosi negatif. Afek negatif yang rendah adalah keadaan dimana seseorang merasakan ketenangan dan kedamaian jauh dari kemarahan, kebencian, ketakutan, rasa bersalah, dan kegelisahan. Kaitannya dengan itu, individu yang memiliki tingkat kesejahteraan subjektif yang tinggi pada umumnya memiliki sejumlah kualitas yang mengagumkan.

Menurut OECD/Organisation for Economic Co-operation and Development (2013), indikator kesejahteraan subyektif dapat dilihat dari (1) Terpenuhinya kebutuhan hidup; (2) Terpenuhinya biaya berobat (kesehatan); (3) Terpenuhinya cita-cita hidup; (4) Terpenuhinya rasa aman pribadi; (5) Mempunyai hubungan baik antar pribadi; (6) Mempunyai hubungan baik dengan komunitas lain; (7) Mempunyai tabungan untuk masa depan; (8) Dapat melakukan kegiatan keagamaan

## Peran Pemerintah

Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Osborne dan Gaebler (1996) bahkan menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.

Secara umum fungsi pemerintahan menurut Haryono (2000) mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu (1) Fungsi Pengaturan, yaitu fungsi yang dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat; (2) Fungsi Pelayanan, yaitu fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan (3) Fungsi Pemberdayaan, yaitu fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan desentralisasi.

Pembangunan nasional telah menjadi komitmen pemerintah dalam memberdayakan UMKM. Saat ini UMKM menjadi salah satu komponen pembangunan nasional. Pentingnya peran UMKM dalam pembangunan nasional diantaranya sebagai penyerap tenaga kerja, menyumbang produk domestik bruto, sumber devisa, serta pendorong Bergeraknya sektor-sektor lainnya. Peran Pemerintah diharapkan mampu mengangkat tingkat Kesejahteraan pelaku usaha. Menurut Nurdin (2014), Peran Pemerintah dalam memberdayakan UMKM diwujudkan sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator.

Penelitian Hildigardis (2019) menemukan bahwa Peran Pemerintah sangat berpengaruh pada pengembangan budaya lokal dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian budaya daerah. Lee dan Tsang (2011) dan Munizu (2010) menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki pengaruh strategis pada kinerja bisnis. Pemerintah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia mengingat UMKM memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan ekonomi negara. Oleh sebab itu Peran Pemerintah menjadi penting bagi peningkatan kinerja UMKM untuk dapat bersaing di pasar global dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan pelaku UMKM (Simamrora, 2016; Adi, 2017; Swastika, dkk, 2017; Agustina, 2019).

## Modal Sosial

Dalam pengembangan sektor UMKM, unsur sosial dan budaya merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam budaya masyarakat Indonesia gotong royong merupakan sebuah warisan nilai-nilai luhur yang sangat berharga sedangkan dalam konsep budaya Bali, budaya *ngayah* serta berkembangnya berbagai lembaga adat merupakan bentuk interaksi sosial sebagai Modal Sosial yang berperan dalam mewujudkan kemajuan bersama. menyebutkan bahwa gotong-royong, tolong-menolong, saling mengingatkan antar individu dalam entitas masyarakat desa merefleksikan semangat saling memberi (*reciprocity*), saling percaya (*trust*), dan adanya jaringan-jaringan sosial (*social networking*). Hal ini membangun kekompakan pada masyarakat untuk bersama-sama dalam melakukan keguatan usaha dan

membentuk kelompok atau asosiasi bisnis, menyelesaikan permasalahan, dan mencari solusi dalam rangka meningkatkan perekonomian (Inayah, 2012).

Keberadaan Modal Sosial merupakan salah satu aset yang sangat penting dan menjadi alat perekat didalam pelaksanaan kegiatan usaha. Modal Sosial pada intinya adalah serangkaian nilai dan norma yang merupakan wujud nyata dari suatu institusi yang bersifat dinamis. Wujud nyata dari Modal Sosial asosiasi bisnis diwujudkan dalam bentuk kepercayaan, jaringan sosial, tanggung jawab dan kerjasama pelaku usaha (Wuysang, 2014). Ridell (1997), mengatakan terdapat tiga indikator Modal Sosial, yaitu: (1) kepercayaan (2) norma dan (3) jaringan, yang bisa dipergunakan untuk mengukur Modal Sosial pelaku UMKM.

Di era globalisasi dan perekonomian dunia dalam pasar bebas saat ini, mulai tampak semakin jelas bahwa peranan *non-human capital* di dalam sistem perekonomian cenderung semakin berkurang. Modal yang demikian ini disebut dengan modal sosial (*social capital*), yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama demi mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok dan organisasi (Coleman, 1988).

Penelitian Niswatin dan Mahdalena (2016) menemukan bukti bahwa salah satu unsur dari Modal Sosial berupa jaringan sosial di masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberadaan *subak* sebagai salah satu kearifan lokal. Penelitian terkait pengaruh Modal Sosial terhadap kinerja UMKM telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya oleh Khoiririni (2014) dan Subroto (2015) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Modal Sosial terhadap kinerja pada UMKM.

Modal Sosial juga berpengaruh pada kewirausahaan dan Kesejahteraan sebagaimana diungkapkan oleh Farsi (2013) yang melakukan penelitian terhadap manager eksekutif pabrik suku cadang kendaraan di Iran dengan mempergunakan 225 sampel dimana hasilnya adalah bahwa Modal Sosial berpengaruh positif pada orientasi kewirausahaan para manager eksekutif tersebut dan dapat meningkatkan kesejahteraan perusahaan. Durojaiye *et al.* (2013) yang melakukan riset untuk mengetahui pengaruh Modal Sosial dalam pertumbuhan keuntungan dalam bisnis perdagangan bahan makanan di Nigeria menunjukkan bahwa Modal Sosial berperan positif dan signifikan terhadap peningkatan keuntungan dalam penjualan bahan makanan di Nigeria.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode studi Pustaka.). Dalam penelitian studi pustaka penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan naskah atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Data pustaka berasal dari sumber sekunder bukan data primer.

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi beberapa jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

## **Pembahasan**

### **Peran Pemerintah Dalam Permeberdayaan Pelaku Usaha**

Menurut Sudaryanto (2011), pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang

kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UKMM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Pemerintah sangat berperan dalam pemberdayaan UMKM sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tujuan pemberdayaan menurut undang-undang ini adalah untuk (1) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; (2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan (3) meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pemerintah sangat berperan dalam pemberdayaan UMKM sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tujuan pemberdayaan menurut undang-undang ini adalah untuk (1) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; (2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan (3) meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

### **Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha**

Peran Pemerintah dalam memberdayakan UMKM diwujudkan sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator (Nurdin *et.al*, 2014; Gulbrandsen, 2014; Steurer, 2010, dengan penjelasan sebagai berikut (1) Regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada UMKM sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan bisnis, (2) Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi pelaku UMKM jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada pelaku UMKM. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan (3) Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM yang diberdayakan.

Menurut kajian pustaka, ada pengaruh antara peran pemerintah terhadap (1) kinerja usaha (Korry *et al.*, 2013; Lee dan Tsang, 2011; Munizu, 2010; Arjawa, *et.al*, 2016: (2) kesejahteraan pelaku usaha (Simamrora, 2016; Adi, 2017; Swastika, *dkk*, 2017; Agustina, 2019). Penelitian Korry *et al.* (2013) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah sangat berperan pada kinerja bisnis Koperasi Unit Desa di Propinsi Bali. Peningkatan pada kualitas kebijakan distributif dan regulatif pemerintah mampu mendorong peningkatan kinerja bisnis. Begitu juga dengan hasil penelitian Lee dan Tsang (2011) dan Munizu (2010) menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki pengaruh strategis pada kinerja bisnis. Hal yang berbeda dihasilkan oleh penelitian Arjawa *et.al*, (2016) yang dilakukan terhadap UKM Kerajinan di Propinsi Bali bahwa Peran Pemerintah secara langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja usaha.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. UMKM memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan ekonomi negara dan untuk itu upaya pengembangan UMKM perlu dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu peran pemerintah menjadi penting bagi peningkatan kinerja UMKM untuk dapat bersaing di pasar global dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM (Simamrora, 2016; Swastika, *dkk*, 2017; Agustina, 2019).

### **Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha**

Modal sosial adalah sumberdaya yang muncul dari hasil interaksi dalam suatu komunitas, baik antar individu maupun antar institusi yang melahirkan ikatan emosional berupa; kepercayaan, hubungan-hubungan timbal balik, jaringan-jaringan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang mambentuk struktur masyarakat yang berguna untuk koordinasi dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Modal sosial akan tumbuh dan berkembang kalau digunakan bersama dan akan mengalami kepunahan kalau tidak dilembagakan secara bersama-sama. Oleh karena itu, pewarisan nilai modal sosial hendaknya dilakukan melalui proses adaptasi, pembelajaran, serta pengalaman dalam praktek nyata.

Modal Sosial diwujudkan dengan indikator (1) kepercayaan (2) norma dan (3) jaringan (Ridell, 1997), dengan penjelasan sebagai berikut, (1) Kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam diri pengusaha yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi, aturan-aturan sosial cenderung bersifat positif; hubungan-hubungan juga bersifat kerjasama. Kepercayaan sosial pada dasarnya merupakan produk dari Modal Sosial yang baik. Adanya Modal Sosial yang baik ditandai oleh adanya lembaga-lembaga sosial yang kokoh, Modal Sosial melahirkan kehidupan sosial yang harmonis; (2) Norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh para pengusaha. Norma-norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar-standar lainnya seperti halnya kode etik profesional. Norma-norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerjasama di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerjasama; dan (3) Jaringan yaitu infrastruktur dinamis dari Modal Sosial berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar petani. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh.

Menurut kajian pustaka, ada pengaruh modal sosial terhadap (1) kinerja usaha (Yuliarmi, *et.al*, 2021; Subroto, 2015; Khoirriini, 2014) dan (2) kesejahteraan (Farsi, 2013; Durojaiye *et al.*, 2013). Penelitian terkait pengaruh modal sosial terhadap kinerja UKM telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya oleh Yuliarmi, *et al* (2021) dan Subroto (2015) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara modal sosial terhadap kinerja pada UKM. Menurut hasil penelitian Khoirriini (2014) menyatakan bahwa modal insani dan modal sosial berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kinerja UKM makanan dan minuman di Kota Bogor.

Modal sosial berpengaruh signifikan terhadap kewirausahaan dan kesejahteraan sebagaimana diungkapkan oleh Farsi (2013) yang melakukan penelitian di Iran dimana hasilnya adalah bahwa modal sosial berpengaruh positif pada orientasi kewirausahaan para manager eksekutif tersebut dan dapat meningkatkan kesejahteraan perusahaan. Durojaiye *et al.* (2013) yang melakukan di Nigeria menunjukkan bahwa modal sosial

berperan positif dan signifikan terhadap peningkatan keuntungan dalam penjualan bahan makanan di Nigeria.

## **Penutup**

### **Simpulan**

- 1) Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta pelaku usaha dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan pelaku usaha perlu dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.
- 2) Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada pelaku usaha sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator. Peran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan pelaku usaha.
- 3) Modal sosial adalah sumberdaya yang muncul dari hasil interaksi dalam suatu komunitas, baik antar individu maupun antar institusi yang melahirkan ikatan emosional berupa kepercayaan, jaringan-jaringan sosial, dan norma-norma yang membentuk struktur masyarakat yang berguna untuk koordinasi dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Modal sosial berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan pelaku usaha.

### **Saran**

- 1) Peran pemerintah ternyata mampu menjadi stimulus untuk peningkatan kesejahteraan pelaku usaha. Peran pemerintah yang diimplementasikan dengan indikator regulator, dinamisator dan fasilitator agar terus dipertahankan dan ditingkatkan karena telah terbukti mampu untuk meningkatkan kinerja pelaku usaha
- 2) Modal sosial mampu untuk memberikan makna pada kesejahteraan pelaku usaha. Modal sosial pelaku usaha perlu untuk terus meningkatkan peran norma dan jaringan dan kepercayaan agar dapat secara terus menerus memberikan makna pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha.

### **Daftar Pustaka**

- Adisasmita, Raharjo. 2013. *Teori-teori Ekonomi Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustina, Made Dian Putri. 2019. *Pengaruh Peran Pemerintah, Partisipasi Masyarakat dan Modal Sosial Terhadap Kualitas Destinasi dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wisata Kabupaten Badung Provinsi Bali*. Disertasi. Denpasar. Universitas Udayana Bali
- Arjawa, I Gde Wedana; Nyoman Djinar Setiawina; Made Kembar Sri Budhi; I Gde Sudjana Budiassa. 2016. The Role of Government, Social Capital And Entrepreneurial Orientation To Export Performance of Craft SME at Bali Province. *European Journal of Business and Management*, Vol.8 No.7 pp.105-114
- Bahri, Arsad. 2019. Kajian Pemberdayaan UMKM Kota Makassar Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha. *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Volume 1*, Nomor 1, Januari – Juni 2019, hal16-26
- Coleman, James S. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. *The American Journal of Sociology*, Vol.94, Supplement: Organizations and Institution: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, pp. S95-S120
- Diener, E., & Chan, M. Y. 2011. Happy People Live Longer: Subjective well-being Contributes to Health and Longevity. *Applied Psychology: Health and Well-Being*,

- 3(1), 1–43
- Diener, E., & Tov, W. 2013. Subjective Well-being. *Research Collection School of Social Sciences*, (4)2.p.1-8
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar. 2020. Data Ekspor dan Data Ekspor Kota Denpasar Tahun 2015-2019. Disperindag Denpasar
- Dipoyudo, Kirdi. 1995. *Keadilan Sosial*. Jakarta: CV Rajawali
- Durojaiye, AM.; Yusuf S.A.; Falusi A.O.; Okorawa V.O. 2013. Social Capital and Its Influence on Profitability of Foodstuff Traders in Southwestern Nigeria. *American Journal of Social and Management Sciences*. Vol. 23, No. 6. P.34-49
- Farsi, J.Y. Rezazadeh. A. Najmabadi. A.D. 2013. Social Capital and Organizational Innovation: The Mediating Effect of Entrepreneurial Orientation. *Journal of Community Positive Practices*, XIII(2) 2013, 22-40
- Friedlander, Walter. 1980. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Gulbrandsen, L. 2014. “Dynamic Governance Interactions: Evolutionary Effects of State Responses to Nonstate Certification Programs.” *Journal of Regulation & Governance* 8(1):74–92.
- Hamid, Edy Suandi. 2010. Pengembangan UMKM Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif*.
- Hildigardis M. I. Nahak. 2019. Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 5, No. 1 , Hal.65-75
- Inayah. 2012. Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan. *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*. Vol. 12 No. 1, April 2012
- Ismail, M., Santoso, D.B., Yustika, A.E. 2015. Sistem Ekonomi Indonesia, Tafsiran Pancasila & UUD 1945. Jakarta : Erlangga
- Khoiririni, Layla dan Kartika, Lindawati. 2014. Pengaruh Modal Insani dan Modal Sosial terhadap Kinerja (Studi Kasus Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Makanan dan Minuman Kota Bogor). *Jurnal Manajemen dan Organisasi*. Vol V, No 3
- Korry, I Nyoman Sugawa. 2013. The Role of Entrepreneurial Orientation in Mediating the Effect of Organizational Culture and Government Policy toward Business Performance (Case Study: Koperasi Unit Desa in Bali Province). *International Journal of Business and Commerce* Vol. 2, No.12: pp.29-42
- Lee, D.Y and Tsang, EW.K. 2011. The Effect of Entrepreneurial Personality, Background and Network Activities on Venture Growth, *Journal of Management Studies*. Vol .38.4: pp 583-602
- Munizu, Musran. 2010. Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 12, No. 1, hal. 33-41
- Niswatin dan Mahdalena. 2016 Nilai Kearifan Lokal ‘Subak’ Sebagai Modal Sosial Transmigrasi Etnis Bali. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 7, No., Hlm. 171-188
- Nurdin, Muhammad, Sitti Nurmaeta, Muhammad Tahir. 2014. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Otoritas* , Vol. IV No. 1, hal.66-78
- Osborne, David dan Gaebler, Ted, 1996. *Mewirausahakan Birokrasi: Reinventing Government, Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor publik*. Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo.

- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) .2013. Guidelines on Measuring Subjective Well-being, OECD Publishing
- Putnam R D. 1993. “The Prosperous Community : Social Capital and Public Life, *The American of Prospect*, Vol 13, pp 35-42
- Putra, Adnan Husada. 2016. Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi* Oktober 2016, 5(2): 40-52
- Friedlander, Walter. 1980. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Riddell, M. 1997. *Social Capital and Policy Development*. Wellington: Wellington, Institute of Policy Studies.
- Steurer, R. 2010. “The Role of Governments in Corporate Social Responsibility: 173 Characterising Public Policies on CSR in Europe.” *Journal of Policy Sciences*, 43:49–72
- Subroto, Rapih. 2015. Analisis Pengaruh Kompetensi SDM, Modal Sosial Dan Modal Finansial Terhadap Kinerja UMKM Bidang Garmen di Kabupaten Klaten. *Disertasi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Sudaryanto. 2011. The Need for ICT-Education for Manager or Agribusinessman to Increasing Farm Income : Study of Factor Influences on Computer Adoption in East Java Farm Agribusiness. *International Journal of Education and Development, JEDICT*, Vol 7 No 1 hal. 56-67
- Swastika, I Putu Danu. 2017. Analisis Pengembangan Agrowisata Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 6.12: 4103-4136
- Wangke, Humphrey. 2014. *Peluang Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Info Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Vol. VI, No. 10/II/P3DI/Mei/2014
- Wuysang, Rendy. 2014. Modal Sosial Kelompok Tani Dalam . *Journal Acta Diurna* Volume III. No.3. hal.14-26
- Yuliarmi, N., N. Martini Dewi, S. Rustariyuni, AAIN Marhaeni, and G. Andika. 2021. “The Effects of Social Capital and Human Resources on Financing and SMEs Performance.” *International Journal of Human Capital in Urban Management* 6(1):29–44.